

**LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN PENGADILAN NEGERI, YOGYAKARTA
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026
(APRIL – JUNI 2026)**



JUNI 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Berdasarkan Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Yogyakarta
Pada Hari Jumat, 26 Juni 2026

Top Management

SYAFRIZAL, S.H

Sekertaris


NINDYA YOSDALU PUTRA

Ketua Tim Survei


NURHADI, S.H

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Yogyakarta mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menayakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Juni 2026

Tim Survei

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	5
1. Latar Belakang	5
2. Maksud Dan Tujuan	5
3. Landasan Hukum	5
4. Rencana Kerja Pelaksanaan	6
BAB II METODOLOGI SURVEI	7
1. Metode Penelitian	7
2. Populasi Dan Sampel	7
3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	7
4. Teknik Pengumpulan Data	7
5. Teknik Analisis Data	7
6. Tahapan pelaksanaan	8
BAB III PROFIL RESPONDEN	10
1. Tingkat pendidikan responden	10
2. Pekerjaan responden	10
3. Domisili responden	11
4. Kelompok usia responden	12
5. Jenis Layanan	12
BAB IV PENGOLAHAN HASIL SURVEI	14
1. Indikator Pelayanan Diluar Prosedur	14
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan	15
3. Indikator Menjual Pengaruh	16
4. Indikator Transparansi Biaya	17
5. Indikator Transaksi Rahasia/Pungutan Liar	18
6. Indikator Hadiah	19
7. Transparansi Pembayaran	20
8. Indikator Percaloan	21
9. Indikator Praktek KKN	21
10. Indikator Intervensi Perkara	22
BAB V PENUTUP	24
A. Kesimpulan	24
B. Rekomendasi	24
C. Penutup	25
LAMPIRAN	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas	8
Tabel 2. Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi	8
Tabel 3. Nilai Persepsi	9
Tabel 4. Tingkat pendidikan responden	10
Tabel 5. Jenis pekerjaan responden	11
Tabel 6. Domisili Responden	11
Tabel 7. Usia responden	12
Tabel 8. Layanan	13
Tabel 9. Indeks pada indikator Pelayanan Diluar Prosedur	14
Tabel 10. Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan	15
Tabel 11. Indeks pada indikator Menjual Pengaruh	16
Tabel 12. Indeks pada indikator Transparansi Biaya	17
Tabel 13. indeks pada indikator transaksi rahasia/Pungutan Liar	18
Tabel 14. Indikator Hadiah	19
Tabel 15. Transparansi Pembayaran	20
Tabel 16. Percaloan	21
Tabel 17. Indeks pada indikator Praktek KKN	22
Tabel 18. Indeks pada indikator Intervensi Perkara	22

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden	10
Grafik 2. Pekerjaan Responden.....	11
Grafik 3. Domisili Responden	12
Grafik 4. Usia Responden	12
Grafik 5. layanan	13
Grafik 6. Pelayanan Tidak Sesuai Prosedur.....	14
Grafik 7. Penyalahgunaan Jabatan	15
Grafik 8. Menjual Pengaruh.....	16
Grafik 9. Transparansi Biaya	17
Grafik 10. Transaksi Rahasia	18
Grafik 11. Hadiah.....	19
Grafik 12. Transparansi Pembayaran.....	20
Grafik 13. Percaloan	21
Grafik 14. Praktek KKN	22
Grafik 15. Intervensi Perkara	23

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

4. Rencana Kerja Pelaksanaan

1. Persiapan

Pengukuran/survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Yogyakarta ini dilaksanakan pada bulan April - Juni 2026.

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- a. Tahapan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan pada *Keputusan Jendral Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1365/DJU/SK/HM.02.3/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SiSuper) Pada Direktorat Jendral Peradilan Umum Dan Peradilan Dibawahnya.*
- b. Penginputan data survei persepsi anti korupsi melalui E- survey dilakukan dengan mengakses link berikut: <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
- c. Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem e-survey untuk mengetahui perkembangan e-survey.

BAB II

METODOLOGI SURVEI

1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (*SiSuper*). Aplikasi ini diletakan/disediakan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Setiap pengguna layanan yang telah menerima layanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta disarankan/diarahkan untuk mengisi aplikasi *SiSuper*.

Data pada penelitian ini diambil dengan instrument online berupa kuesioner dengan <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>

5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1. Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2. Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3.Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
PROFIL RESPONDEN

Dari hasil survey yang dilakukan melalui *aplikasi SiSuper Badilum* pada periode Tri Wulan II Tahun 2026 atau periode bulan April – Juni 2026 diperoleh 64 responden dan profil responden/pengguna layanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai berikut :

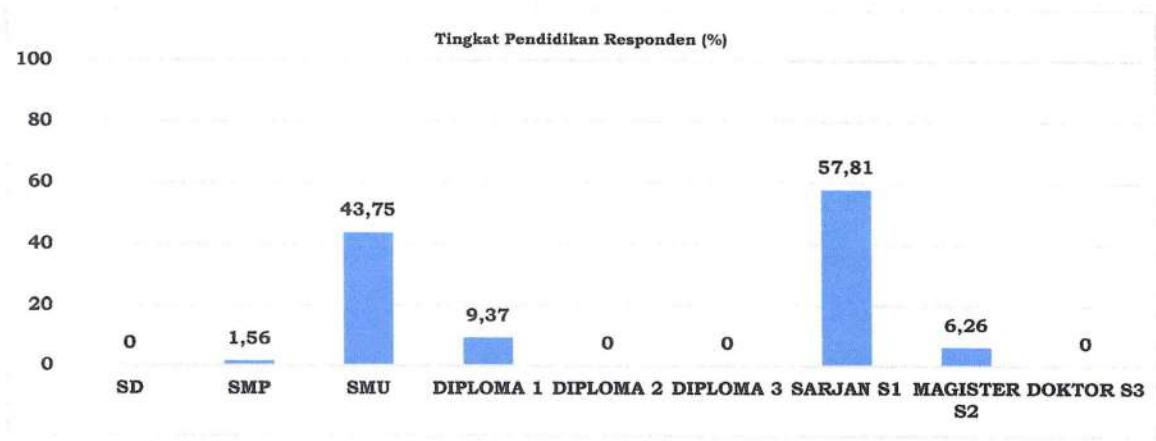
1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei dari aplikasi *SiSuper Badilum* responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan tingkat pendidikan dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Tingkat pendidikan responden

No.	Pendidikan terakhir	Frekuensi	%
1	SD	0	0
2	SMP	1	1,56
3	SMU	28	43,75
4	DIPLOMA 1	6	9,37
5	DIPLOMA 2	0	0
6	DIPLOMA 3	0	0
7	SARJAN S1	37	57,81
8	MAGISTER S2	4	6,26
9	DOKTOR S3	0	0
Jumlah		64	100

Dari hasil survei tersebut diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dari 64 responden mayoritas memiliki latar pendidikan Setrata I sebanyak 37 responden atau 57,81%.



Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden

2. Pekerjaan responden

Dari hasil survei dari aplikasi *SiSuper Badilum* responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan pekerjaan responden

dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Jenis pekerjaan responden

N o	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	ASN (PNS/PPPK)	3	4,68
2	TNI	0	0
	POLRI	1	1,56
3	WIRASWASTA	7	10,93
4	WIRAUSAHA	1	1,56
5	TENAGA KONTRAK	0	0
6	LAINNYA	52	81,25
Jumlah		64	100

Dari sisi jenis pekerjaan dari 64 responden menunjukkan bahwa sebanyak 52 responden atau 81,25% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki pekerjaan lainnya.



Grafik 2. Pekerjaan Responden

3. Domisili responden

Dari hasil survei dari aplikasi SiSuper Badilum responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan domisili responden dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini

Tabel 6. Domisili Responden

Nomor	Wilayah Domisili	Frekuensi	%
1	D.I. YOGYAKARTA	54	84,75
2	BENGKULU	1	1,56
3	DKI JAKARTA	1	1,56
4	JAWA BARAT	1	1,56
5	JAWA TENGAH	1	1,56
6	JAWA TIMUR	1	1,56
7	LAMPUNG	1	1,56
Jumlah		64	100

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domilisi, responden paling banyak berasal dari D.I. Yogyakarta dengan 54 responden atau 84,75%



Grafik 3. Domisili Responden

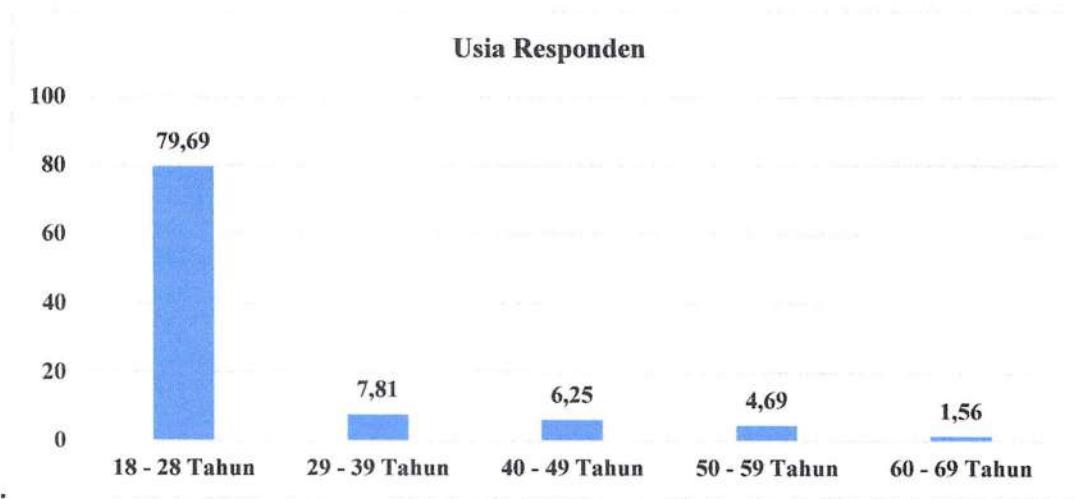
4. Kelompok usia responden

Dari hasil survei dari aplikasi *SiSuper Badilum* responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan kelompok usia responden dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini

Tabel 7. Usia responden

Kategori Umur	Jumlah	Persentase (%)
18 - 28 Tahun	51 Orang	79,69
29 - 39 Tahun	5 Orang	7,81
40 - 49 Tahun	4 Orang	6,25
50 - 59 Tahun	3 Orang	4,69
60 - 69 Tahun	1 Orang	1,56

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun dengan jumlah 51 Orang atau 79,69% .



Grafik 4. Usia Responden

5. Jenis Layanan

Dari hasil survei dari aplikasi *SiSuper Badilum* responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan jenis layanan responden

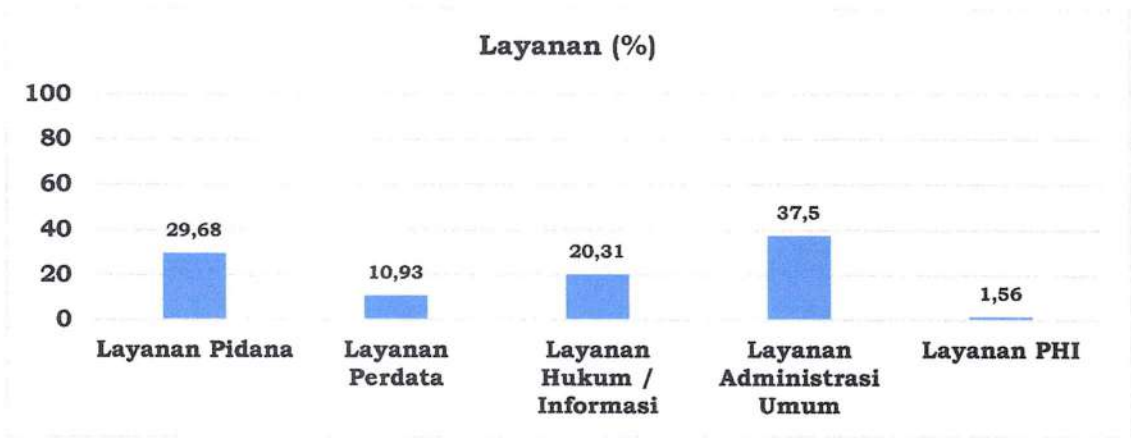
dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Layanan

No	Layanan Satker	Total Pemohon	(%)
1	Layanan Pidana	19	29,68
2	Layanan Perdata	7	10,93
3	Layanan Hukum / Informasi	13	20,31
4	Layanan Administrasi Umum	24	37,5
5	Layanan PHI	1	1,56

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan meja layanan yang dikunjungi, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan menggunakan meja layanan Administrasi Umum dengan jumlah 24 Orang atau 37,5% .

Dalam grafik ditampilkan sebagai berikut:



Grafik 5. layanan

BAB IV
PENGOLAHAN HASIL SURVEI

Pada bagian ini disajikan hasil pengolahan data Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2026 melalui aplikasi *siSUPER Badilum* di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Data yang diperoleh dari responden diolah dan dianalisis berdasarkan 9 unsur pelayanan sesuai dengan pedoman dalam **Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017**. Hasil ini memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan masyarakat serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Aplikasi *siSuSUPER Badilum* dengan 64 responden.

Adapun hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebesar **3,96/98,98%** berada pada kategori “**SANGAT BAIK**” (pada interval 88,31 s/d 100,00).

Hasil IPK tersebut di atas, terdiri dari 10 (sepuluh) ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap hasil survei, sebagai berikut;

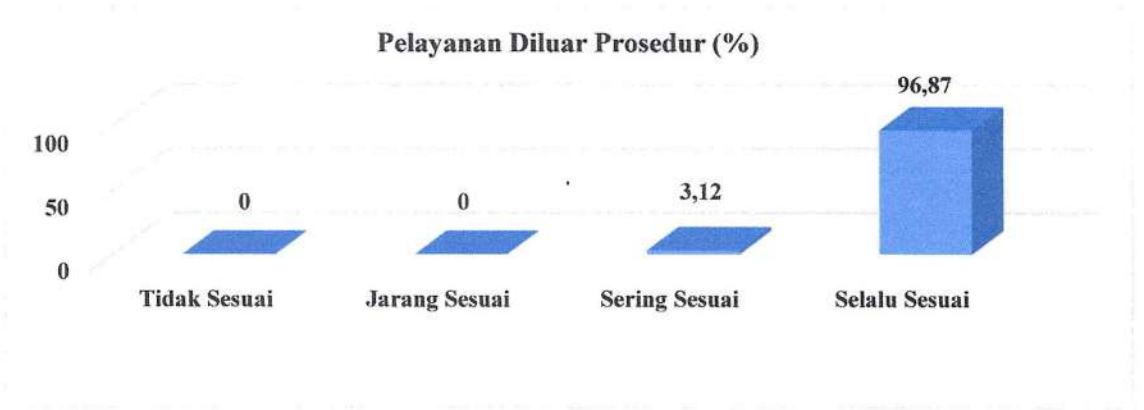
1. Indikator Pelayanan Diluar Prosedur

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pelayanan Diluar Prosedur dari rentang jawaban yang diperoleh dari *Aplikasi SiSuper* menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 9. Indeks pada indikator Pelayanan Diluar Prosedur

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Sesuai	1	0	0
2.	Jarang Sesuai	2	0	0
3.	Sering Sesuai	3	2	3,12
4.	Selalu Sesuai	4	62	96,87
Jumlah			64	100

Berdasarkan tabel diatas secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 6. Pelayanan Tidak Sesuai Prosedur

Dari dari tabel dan grafik Indikator Pelayanan Diluar Prosedur dari 64 responden yang paling banyak menjawab *Selalu Sesuai* sebanyak 62 responden atau 96,87%.

Menurut hasil perhitungan IPAK dari aplikasi *SiSuper Badilum* pada Perode Triwulan II Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Nilai per Unsur	254
NRR per Unsur	3.969
NRR Tertimbang	0.397

Dari data diatas dikonversikan dalam Standar Nilai dan Bobot IPAK masuk dalam kategori mutu sangat baik masuk dalam skala 100 yaitu 88,31 – 100,00 dan masuk dalam Skala 4 3,53 – 4,00. Nilai sebesar berada pada kategori A **“Sangat Baik”**.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada indikator Manipulasi Peraturan masuk dalam kategori *tidak ada Pelayanan diluar Prosedur*.

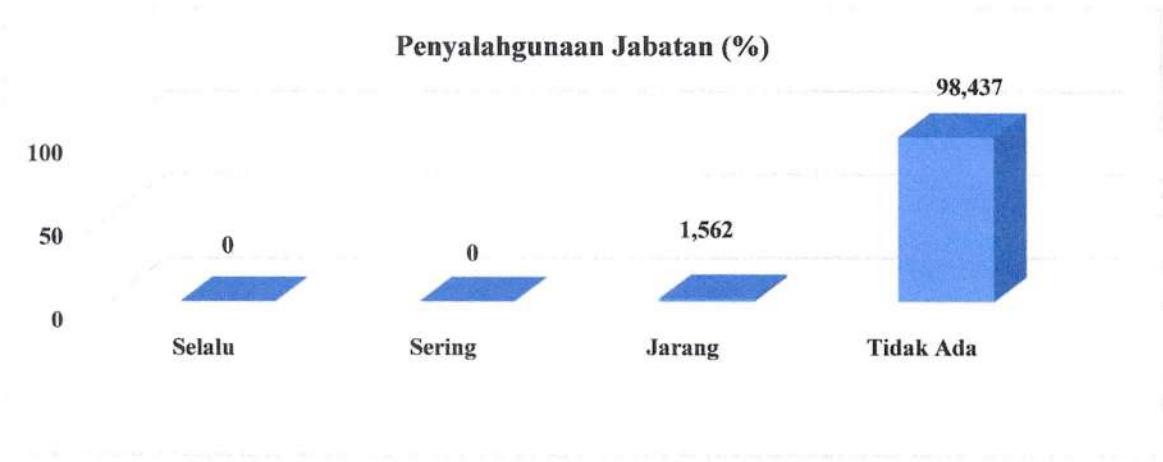
2. **Indikator Penyalahgunaan Jabatan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan dari rentang jawaban yang diperoleh dari Aplikasi SiSuper menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 10. Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	selalu meminta imbalan	1	0	0
2.	sering meminta imbalan	2	0	0
3.	jarang meminta imbalan	3	1	1,562
4.	tanpa meminta imbalan	4	63	98,437
Jumlah			64	100

Berdasarkan tabel diatas secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini



Grafik 7. Penyalahgunaan Jabatan

Dari dari tabel dan grafik Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan dari 64 responden yang paling banyak menjawab *Tanpa Meminta Imbalan* sebanyak 63 responden atau 98,437%.

Menurut hasil perhitungan IPAK dari aplikasi SiSuper pada Perode Triwulan II Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Nilai per Unsur	255
NRR per Unsur	3.984
NRR Tertimbang	0.398

Dari data diatas dikonversikan dalam Standar Nilai dan Bobot IPAK masuk dalam kategori mutu sangat baik, masuk dalam skala 100 yaitu 88,31 – 100,00 dan masuk dalam Skala 4 3,53 – 4,00. Nilai mutu berada pada kategori A **“Sangat Baik”**.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada indikator Penyalahgunaan Jabatan masuk dalam kategori *tidak ada penyalahgunaan jabatan*.

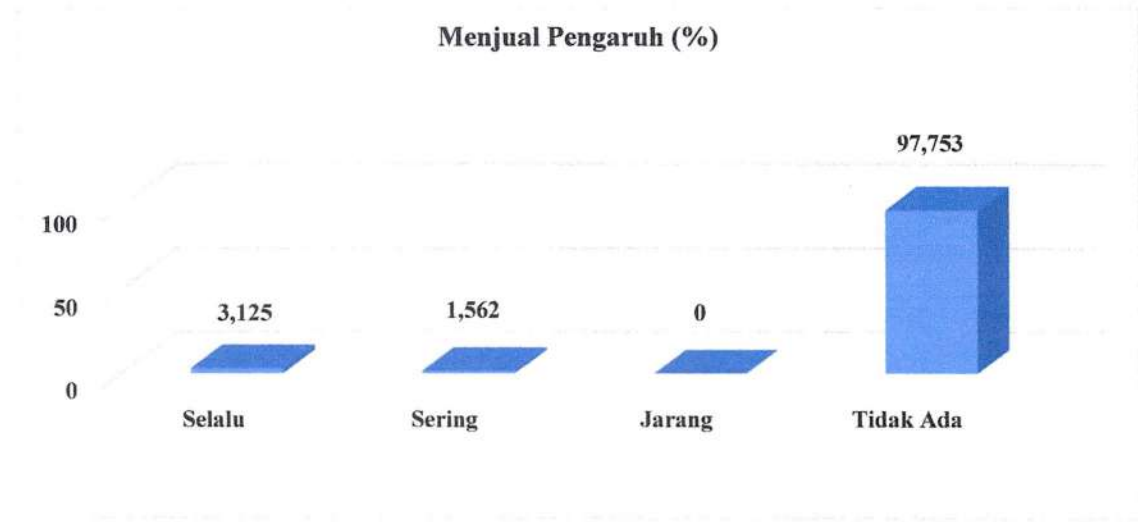
3. **Indikator Menjual Pengaruh**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh dari rentang jawaban yang diperoleh dari Aplikasi *SiSuper Badilum* menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 11. Indeks pada indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	2	3,125
2.	Sering	2	1	1,562
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	61	97,753
Jumlah			64	100

Berdasarkan tabel diatas secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 8. Menjual Pengaruh

Dari dari tabel dan grafik Ruang Lingkup Menjual Pengaruh dari 64 responden yang paling banyak menjawab *Tidak Ada* sebanyak 61 responden atau 97,753%.

Menurut hasil perhitungan IPAK dari aplikasi SiSuper pada Perode Triwulan II Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Nilai per Unsur	246
NRR per Unsur	3.875
NRR Tertimbang	0.388

Dari data diatas dikonversikan dalam Standar Nilai dan Bobot IPAK masuk dalam kategori mutu sangat baik, masuk dalam skala 100 yaitu 88,31 – 100,00 dan masuk dalam Skala 4 3,53 – 4,00. Nilai mutu berada pada kategori A **“Sangat Baik”**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada indikator Penyalahgunaan Jabatan masuk dalam kategori *tidak ada Menjual Pengaruh*.

4. **Indikator Transparansi Biaya**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya dari rentang jawaban yang diperoleh dari Aplikasi SiSuper menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 12. Indeks pada indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	4	63	98,437
2.	Sering	3	1	1,562
3.	Jarang	2	0	0
4.	Tidak Pernah	1	0	0
Jumlah			64	100

Berdasarkan tabel diatas secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 9. Transparansi Biaya

Dari dari tabel dan grafik Ruang Lingkup Transparansi Biaya dari 64 responden yang paling banyak menjawab *Selalu* sebanyak 63 responden atau 98,437%. Menurut hasil perhitungan IPAK dari aplikasi SiSuper pada Perode Triwulan II Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Nilai per Unsur	255
NRR per Unsur	3.984

NRR Tertimbang	0.398
----------------	-------

Dari data diatas dikonversikan dalam Standar Nilai dan Bobot IPAK masuk dalam kategori mutu sangat baik, masuk dalam skala 100 yaitu 88,31 – 100,00 dan masuk dalam Skala 4 3,53 – 4,00. Nilai mutu berada pada kategori A **“Sangat Baik”**.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada indikator Penyalahgunaan Jabatan masuk dalam kategori *Selalu Melakukan Transparansi dalam Pembayaran*.

5. **Indikator Transaksi Rahasia/Pungutan Liar**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Indikator Transaksi Rahasia/Pungutan Liar dari rentang jawaban yang diperoleh dari Aplikasi SiSuper menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 13. indeks pada indikator transaksi rahasia/Pungutan Liar

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	1	0	0
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	0	0
4.	Selalu	4	64	100
Jumlah			64	100

Berdasarkan tabel diatas secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 10. Transaksi Rahasia

Dari dari tabel dan grafik Ruang Lingkup Transaksi Rahasia/Pungutan Liar dari 64 responden yang paling banyak menjawab *Selalu membayar dengan tarif resmi* sebanyak 64 responden atau 100%.

Menurut hasil perhitungan IPAK dari aplikasi SiSuper pada Perode Triwulan II Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Nilai per Unsur	256
NRR per Unsur	4,000
NRR Tertimbang	0.400

Dari data diatas dikonversikan dalam Standar Nilai dan Bobot IPAK masuk dalam kategori mutu sangat baik, masuk dalam skala 100 yaitu 88,31 – 100,00 dan masuk dalam Skala 4 3,53 – 4,00. Nilai mutu berada pada kategori A “**Sangat Baik**”.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada indikator Penyalahgunaan Jabatan masuk dalam kategori *Selalu Melakukan Transparansi dalam Pembayaran*.

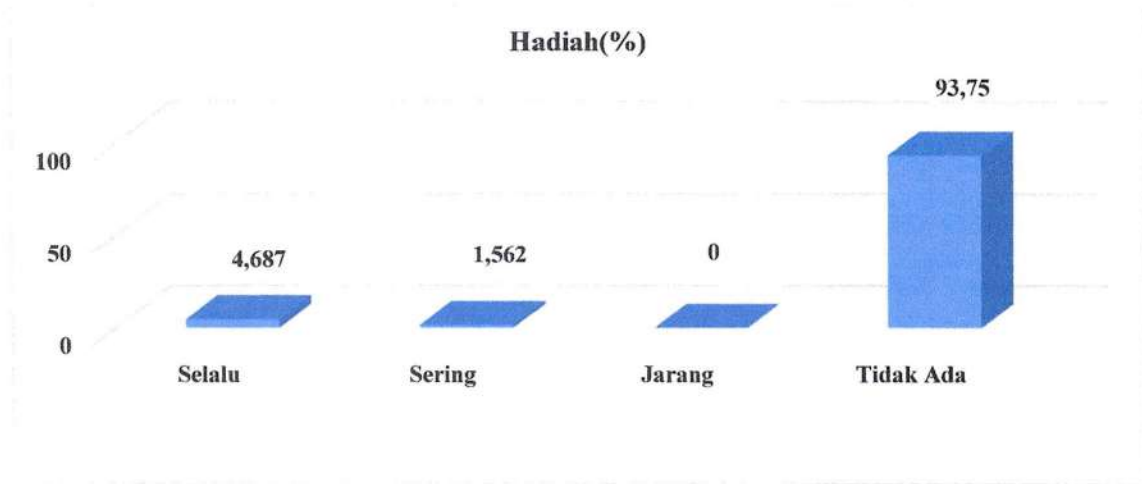
6. **Indikator Hadiah**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah dari rentang jawaban yang diperoleh dari Aplikasi SiSuper menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 14. Indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	3	4,687
2.	Sering	2	1	1,562
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	60	93,75
Jumlah			64	100

Berdasarkan tabel diatas secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 11. Hadiah

Dari dari tabel dan grafik Ruang Lingkup Hadiah dari 64 responden yang paling banyak menjawab *Tidak Ada* sebanyak 60 responden atau 93,75%.

Menurut hasil perhitungan IPAK dari aplikasi SiSuper pada Perode Triwulan II Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Nilai per Unsur	245
NRR per Unsur	3.828
NRR Tertimbang	0.383

Dari data diatas dikonversikan dalam Standar Nilai dan Bobot IPAK masuk dalam kategori mutu sangat baik, masuk dalam skala 100 yaitu 88,31 – 100,00 dan masuk dalam Skala 4 3,53 – 4,00. Nilai mutu berada pada kategori A “**Sangat Baik**”.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada indikator Tambahan Biaya masuk dalam kategori *Bersih dari pemberian/penerimaan Hadiah*.

7. **Transparansi Pembayaran**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran dari rentang jawaban yang diperoleh dari Aplikasi SiSuper menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 15. *Transparansi Pembayaran*

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	1	0	0
2.	Jarang	2	1	1,562
3.	Sering	3	1	1,562
4.	Selalu	4	62	96,875
Jumlah			64	100

Berdasarkan tabel diatas secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 12. *Transparansi Pembayaran*

Dari dari tabel dan grafik Ruang Lingkup Transparansi Biaya dari 64 responden yang paling banyak menjawab *Selalu* sebanyak 62 responden atau 96,875%.

Menurut hasil perhitungan IPAK dari aplikasi SiSuper pada Perode Triwulan II Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Nilai per Unsur	253
NRR per Unsur	3.953
NRR Tertimbang	0.395

Dari data diatas dikonversikan dalam Standar Nilai dan Bobot IPAK masuk dalam kategori mutu sangat baik, masuk dalam skala 100 yaitu 88,31 – 100,00 dan masuk dalam Skala 4 3,53 – 4,00. Nilai mutu berada pada kategori A “**Sangat Baik**”.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada indikator Tambahan Biaya masuk dalam kategori *Bersih dari transaksi Rahasia*

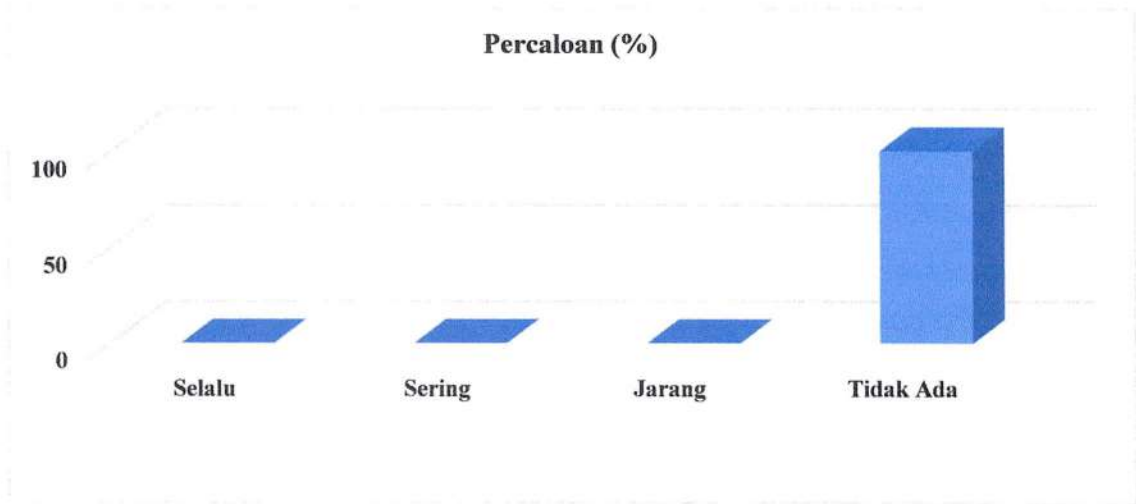
8. **Indikator Percaloan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan dari rentang jawaban yang diperoleh dari Aplikasi SiSuper menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 16. Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	64	100
Jumlah			64	100

Berdasarkan tabel diatas secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 13. Percaloan

Dari dari tabel dan grafik Ruang Lingkup Percaloan dari 64 responden yang paling banyak menjawab *Tidak ada* sebanyak 64 responden atau 100%.

Menurut hasil perhitungan IPAK dari aplikasi SiSuper pada Perode Triwulan II Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Nilai per Unsur	256
NRR per Unsur	4,000
NRR Tertimbang	0.400

Dari data diatas dikonversikan dalam Standar Nilai dan Bobot IPAK masuk dalam kategori mutu sangat baik, masuk dalam skala 100 yaitu 88,31 – 100,00 dan masuk dalam Skala 4 3,53 – 4,00. Nilai mutu berada pada kategori A “**Sangat Baik**”.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada indikator Tambahan Biaya masuk dalam kategori *Bersih dari Praktek Percaloan*.

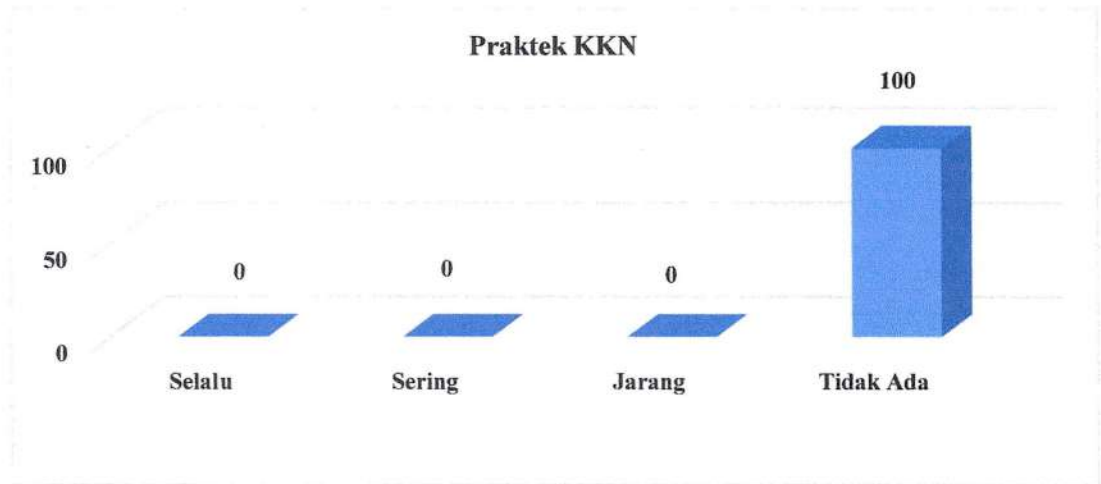
9. **Indikator Praktek KKN**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Praktek KKN dari rentang jawaban yang diperoleh dari Aplikasi SiSuper menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 17. Indeks pada indikator Praktek KKN

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	64	100
Jumlah			64	100

Berdasarkan tabel diatas secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 14. Praktek KKN

Dari dari tabel dan grafik Ruang Lingkup Praktek KKN dari 64 responden yang paling banyak menjawab *Tidak ada* sebanyak 64 responden atau 100%.

Menurut hasil perhitungan IPAK dari aplikasi SiSuper pada Perode Triwulan II Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Nilai per Unsur	256
NRR per Unsur	4,000
NRR Tertimbang	0.400

Dari data diatas dikonversikan dalam Standar Nilai dan Bobot IPAK masuk dalam kategori mutu sangat baik, masuk dalam skala 100 yaitu 88,31 – 100,00 dan masuk dalam Skala 4 3,53 – 4,00. Nilai mutu berada pada kategori A “**Sangat Baik**”.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada indikator Tambahan Biaya masuk dalam kategori *Bersih dari Praktek KKN*.

10. Indikator Intervensi Perkara

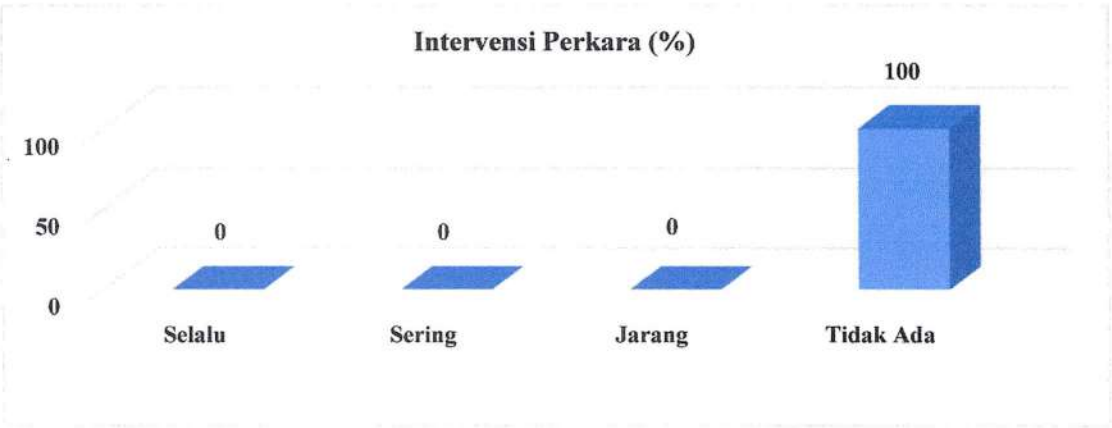
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Intervensi Perkara dari rentang jawaban yang diperoleh dari Aplikasi SiSuper menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 18. Indeks pada indikator Intervensi Perkara

			Frekuensi
--	--	--	-----------

No.	Jawaban	Skor	f	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	64	100
Jumlah			64	100

Berdasarkan tabel diatas secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini



Grafik 15. Intervensi Perkara

Dari dari tabel dan grafik Ruang Lingkup Intervensi Perkara dari 64 responden yang paling banyak menjawab *Tidak ada* sebanyak 64 responden atau 100%.

Menurut hasil perhitungan IPAK dari aplikasi SiSuper pada Perode Triwulan II Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Nilai per Unsur	256
NRR per Unsur	4,000
NRR Tertimbang	0.400

Dari data diatas dikonversikan dalam Standar Nilai dan Bobot IPAK masuk dalam kategori mutu sangat baik, masuk dalam skala 100 yaitu 88,31 – 100,00 dan masuk dalam Skala 4 3,53 – 4,00. Nilai mutu berada pada kategori A **“Sangat Baik”**.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada indikator Tambahan Biaya masuk dalam kategori *Bersih dari Praktek Intervensi Perkara*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Triwulan II Tahun 2026 pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, diperoleh nilai rata-rata tertimbang (NRR Tertimbang) sebesar **3,96**. Dengan menggunakan metode konversi IPK, diperoleh nilai indeks sebesar : $3,96 \times 25 = 98,98$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap integritas dan kualitas penyelenggaraan layanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta berada pada kategori **Sangat Baik**.

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian sangat positif terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Beberapa unsur memperoleh nilai maksimal, yang mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dan komitmen aparatur dalam menjaga integritas.

Secara umum, hasil survei ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Capaian ini merupakan hasil dari komitmen seluruh aparatur dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa unsur yang memperoleh nilai relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya, sehingga tetap memerlukan perhatian dan perbaikan secara berkelanjutan agar tingkat kepercayaan masyarakat dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Triwulan II Tahun 2026, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta antara lain:

1. Mempertahankan Komitmen Integritas

Seluruh aparatur Pengadilan Negeri Yogyakarta perlu terus menjaga komitmen terhadap nilai-nilai integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan Pengawasan Internal

Penguatan fungsi pengawasan internal perlu terus dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, maupun praktik yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.

3. Mengoptimalkan Sosialisasi Anti Korupsi

Kegiatan sosialisasi mengenai budaya anti korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan, serta mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran perlu dilaksanakan secara berkesinambungan kepada pegawai maupun masyarakat pengguna layanan.

4. Meningkatkan Transparansi Pelayanan

Informasi mengenai prosedur, persyaratan, biaya, dan standar pelayanan perlu terus disampaikan secara terbuka dan mudah diakses sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan terhindar dari potensi penyimpangan.

5. Mengoptimalkan Sarana Pengaduan Masyarakat

Mekanisme pengaduan yang telah tersedia perlu terus ditingkatkan efektivitasnya agar masyarakat dapat menyampaikan laporan, saran, maupun masukan dengan mudah dan memperoleh tindak lanjut yang cepat serta transparan.

6. Melaksanakan Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Hasil survei IPK hendaknya digunakan sebagai bahan evaluasi berkala dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan memperkuat budaya kerja yang bersih serta bebas korupsi.

C. Penutup

Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta memperoleh nilai indeks sebesar **98,98** dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas aparatur dan penyelenggaraan pelayanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Ke depan, upaya peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas perlu terus dilakukan secara konsisten guna mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya masyarakat.

LAMPIRAN

NO	NAMA	NOMOR TLP
1	NafishaID: R-098057-IPAK-B9E2C95AAE	P : 087738110945
2	Zahwa Putri AuliaID: R-098057-IPAK-B654CC3F51	P : 089627773143
3	AnonimID: R-098057-IPAK-5935E0510F	P : 081390735747
4	MaharaniID: R-098057-IPAK-E7E282EAF0	P : 085229251006
5	MaritzalID: R-098057-IPAK-8D43859193	P : 085229865757
6	InesID: R-098057-IPAK-74B1456B06	P : 081220820406
7	Kartika ID: R-098057-IPAK-22E3CCC187	P : 081215320917
8	NailaID: R-098057-IPAK-A149153A8A	P : 085291173116
9	SITA ARSANTIID: R-098057-IPAK-6487A1F791	P : 0882006074141
10	Millatun anifiyyahID: R-098057-IPAK-7A77C9C192	P : 081226300544
11	NID: R-098057-IPAK-C18D3266F7	P : 0895345360305
12	Naura Syifa SalsabilaID: R-098057-IPAK-EE8B7B3F3E	P : 08888406535
13	NIKA VEBRIANAID: R-098057-IPAK-056BC62B67	P : 081392499463
14	Julia Rachma SayidhinalID: R-098057-IPAK-7780B651F2	P : 081327556868
15	Yulia Arum RachmawatiID: R-098057-IPAK-3D875682EA	P : 081215914386
16	LuluID: R-098057-IPAK-0D6FE28670	P : 081221377080
17	Putri Salsabila ID: R-098057-IPAK-3393C0CEB9	P : 082135555976
18	LINDA KRISTIANI SIANTURIID: R-098057-IPAK-2E2E293472	P : 089525069091
19	RubyID: R-098057-IPAK-76E194BEB9	P : 085846231214
20	RADEN ALFIN SATRIOID: R-098057-IPAK-AA4C7A4D01	P : 08112773331
21	Muhammad Rehandiarsa YasjudanID: R-098057-IPAK-D1F42E00C0	P : 0895621124625
22	Elya Marsyanda/EMID: R-098057-IPAK-CCAF5E634B	P : 082186467311
23	Sania Zahra ID: R-098057-IPAK-FE48ABCEB3	P : 082254538747
24	Khalila Fatikha Zamna ID: R-098057-IPAK-01EC0BDC7B	P : 082241157277
25	Intan FitriandaID: R-098057-IPAK-A3A65D10C5	P : 085376744500
26	M Zaenal Fanani ID: R-098057-IPAK-D8E0648E35	P : 085712844606
27	Bonaventura KrisnaID: R-098057-IPAK-E4539A7935	P : 087746289978
28	VIOLYTAID: R-098057-IPAK-E75434B5FE	P : 085295495566
29	Vania CalistiaID: R-098057-IPAK-36516B366B	P : 081345351561
30	Bagas Dwi SatrioID: R-098057-IPAK-C7FFF03131	P : 089683393721
31	Alif Rizky erudinID: R-098057-IPAK-A8E495DCE7	P : 088802996507
32	MID: R-098057-IPAK-D0F1F6AC19	P : 085174299276
33	RIZALID: R-098057-IPAK-2CAD2D709A	P : 087824201393
34	SID: R-098057-IPAK-0B3D3993C4	P : 085755928637
35	Sigit Priyo Susanto, S.ID: R-098057-IPAK-9880FD4264	P : 087738011344
36	Aviata Nur ElisaID: R-098057-IPAK-0C693D6EE1	P : 081233207126
37	EvanID: R-098057-IPAK-A6BFAD5EE2	P : 0895323671625
38	IkraID: R-098057-IPAK-7879EFD6DC	P : 082184284938
39	GhealID: R-098057-IPAK-CBB3FF41AA	P : 085727288813
40	Naufal Razaan Nur AhnafID: R-098057-IPAK-5E6FC321A0	P : 088225175023
41	Persia AqilaID: R-098057-IPAK-4B359C6650	P : 089636500505
42	Yossi SetiawanID: R-098057-IPAK-79F3E73B15	P : 08562977966
43	Vellysia PramuditaID: R-098057-IPAK-15D55C470E	P : 089520295929
44	Sri PurwantiID: R-098057-IPAK-5E643EFE01	P : 083177765745
45	RisdiyantoID: R-098057-IPAK-E0780CB4C6	P : 087789153198
46	JarwantoID: R-098057-IPAK-C165088E02	P : 0881012317841
47	Puji RahayuID: R-098057-IPAK-C6E8EF0DD6	P : 082215265515

48	Bagas Dwi SatrioID: R-098057-IPAK-2FD1D69D41	P : 089683393721
49	Alif Rizky erudinID: R-098057-IPAK-46D7269AB9	P : 088802996507
50	CINTYAIID: R-098057-IPAK-8059BE8E49	P : 081291239708
51	TERESIA WIDIANINGSI ERESIA WIDIANINGSI ID: R-098057-IPAK-11A9E31165	P : 081947828795
52	EDO ARDIANSA ID: R-098057-IPAK-5A667E40A3	P : 081947828795
53	Arjuna Satria NagaraID: R-098057-IPAK-16A27F4DB3	P : 088983235942
54	Zeni Murtisari ID: R-098057-IPAK-84BA36F27F	P : 088228641795
55	M. FARI ASYIM, S. .ID: R-098057-IPAK-BAB33A87DF	P : 081227908009
56	REZA ANDYAN W, S. .ID: R-098057-IPAK-2DBF009C99	P : 085161340134
57	Sri andayaniID: R-098057-IPAK-182CED9FAC	P : 085743125578
58	Rio DeonaID: R-098057-IPAK-CF76C0102C	P : 0896753324
59	YosID: R-098057-IPAK-8E15A85005	P : 081904032504
60	Mayasari NauraID: R-098057-IPAK-84FB36D85B	P : 08934567654
61	Azizah Putri AnjaniID: R-098057-IPAK-618FF47BB6	P : 08923456435
62	Berdus KalindraID: R-098057-IPAK-DD6BAEA887	P : 89023453334
63	Danuarta Georgio AbrahamID: R-098057-IPAK-1813506EB3	P : 8902345678921
64	Vselo ID: R-098057-IPAK-46C8F0BBD7	P : 89432234567